

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
2. PROGRAM : CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
4. KEGIATAN : 7390 - Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 47 - Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria
48 - Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I
49 - Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II
50 - Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
51 - Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal
52 - Sekretaris Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
01 - Sekretariat Kementerian Koordinator

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria		3.209.000,0
01.01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria yang Dihasilkan	2	
02	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I		3.048.000,0
02.01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I yang Dihasilkan	4	
03	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II		3.104.000,0
03.01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II yang dihasilkan	5	
04	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi		2.942.000,0
04.01	Jumlah Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi yang Dihasilkan	3	
05	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal		3.048.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								759.740
	053 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan										793.886
		Pusat	Pusat								793.886
	054 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal										720.988
		Pusat	Pusat								720.988
06	<i>Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang</i>										2.361.050
06.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah										2.361.050
06.ABP.006	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang										2.361.050
	051 - Pengendalian Upaya Transformatif Super Prioritas Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang										2.361.050
		Pusat	Pusat								2.361.050
Total											17.712.050

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria				3.209.000,0				0,0	0,0	0,0
01.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		Rekomendasi Kebijakan		3.209.000,0				0,0	0,0	0,0
01.ABP.001	Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	2	Rekomendasi Kebijakan		3.209.000,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.ABP.001.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Perencanaan, Penetapan, dan Pengendalian Kebijakan Penataan Ruang	1,0	Rekomendasi Kebijakan	2.012.520,0	2.012.520,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ABP.001.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Perencanaan, Penetapan, dan Pengendalian Kebijakan Agraria	1,0	Rekomendasi Kebijakan	1.196.480,0	1.196.480,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.FAN	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Paket		0,0				0,0	0,0	0,0
01.FAN.ZZ1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1	Paket		0,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.FAN.ZZ1.ZZ1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	0,0	Paket	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I				3.048.000,0				0,0	0,0	0,0
02.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		Rekomendasi Kebijakan		3.048.000,0				0,0	0,0	0,0
02.ABP.002	Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I	4	Rekomendasi Kebijakan		3.048.000,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
02.ABP.002.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pemerataan Pembangunan Wilayah I	1,0	Rekomendasi Kebijakan	1.381.831,0	1.381.831,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.ABP.002.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Wilayah I	1,0	Rekomendasi Kebijakan	542.037,0	542.037,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.ABP.002.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah I	1,0	Rekomendasi Kebijakan	547.584,0	547.584,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.ABP.002.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah I	1,0	Rekomendasi Kebijakan	576.548,0	576.548,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II				3.104.000,0				0,0	0,0	0,0
03.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		Rekomendasi Kebijakan		3.104.000,0				0,0	0,0	0,0
03.ABP.003	Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II	5	Rekomendasi Kebijakan		3.104.000,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
03.ABP.003.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Kalimantan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	518.963,0	518.963,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABP.003.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Sulawesi	1,0	Rekomendasi Kebijakan	547.587,0	547.587,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABP.003.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku	1,0	Rekomendasi Kebijakan	775.954,0	775.954,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABP.003.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Papua	1,0	Rekomendasi Kebijakan	840.753,0	840.753,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABP.003.055	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Tata Ruang dan Pemerataan Pembangunan Wilayah dalam rangka Integrasi Proyek Kereta Cepat Nasional	1,0	Rekomendasi Kebijakan	420.743,0	420.743,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi				2.942.000,0				0,0	0,0	0,0
04.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		Rekomendasi Kebijakan		2.942.000,0				0,0	0,0	0,0
04.ABP.004	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	3	Rekomendasi Kebijakan		2.942.000,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
04.ABP.004.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan dan Penguatan Daya Saing Kawasan Perdesaan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	967.053,0	967.053,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.ABP.004.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan dan penguatan daya Saing Kawasan Transmigrasi (KT)	1,0	Rekomendasi Kebijakan	1.003.565,0	1.003.565,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.ABP.004.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Transformasi Kebijakan Transmigrasi dan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT)	1,0	Rekomendasi Kebijakan	971.382,0	971.382,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal				3.048.000,0				0,0	0,0	0,0
05.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		Rekomendasi Kebijakan		3.048.000,0				0,0	0,0	0,0
05.ABP.005	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	4	Rekomendasi Kebijakan		3.048.000,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
05.ABP.005.051	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	773.386,0	773.386,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05.ABP.005.052	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir	1,0	Rekomendasi Kebijakan	759.740,0	759.740,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05.ABP.005.053	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	793.886,0	793.886,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
05.ABP.005.054	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal	1,0	Rekomendasi Kebijakan	720.988,0	720.988,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
06	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang				2.361.050,0				0,0	0,0	0,0
06.ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah		Rekomendasi Kebijakan		2.361.050,0				0,0	0,0	0,0
06.ABP.006	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	1	Rekomendasi Kebijakan		2.361.050,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
06.ABP.006.051	Pengendalian Upaya Transformatif Super Prioritas Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Utama	2.361.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.361.050,0
Total			17.712.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.712.050,0

Jakarta, 28 Januari 2026